



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Materi Narasumber

**Kebijakan Pengelolaan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Daerah DIY**

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Yang Kami hormati:

- Kepala BKD DIY;
- Koordinator Pejabat Fungsional;
- Pengelola Kepegawaian;
- Tamu Undangan serta hadirin yang berbahagia.

“Revolusi Industri Keempat memungkinkan masyarakat menguasai penggunaan teknologi dengan otonomi yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini bisa menjadi penantang layanan pemerintah dan institusinya melalui cara-cara yang disruptif.

Pelayanan pemerintah akan dibandingkan dengan kemudahan dan kenyamanan penggunaan teknologi secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah di era digital nan disruptif ini? Jawabannya sederhana: Menjaga kohesi sosial!

Saran tersebut disampaikan oleh **David Lye**, konsultan perusahaan General Electric. Ada benarnya apa yang disampaikan oleh Lye. Aparat pemerintah memang harus menguasai teknologi, mengikuti tuntutan dan perubahan jaman, tetapi tetap harus *cancut taliwanda*, turun langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknologi tetaplah teknologi, sebarang benda mati yang kadang memiliki dua sisi—dan dipastikan tidak mempunyai hati nurani. Mau tidak mau, aparat pemerintah sebagai *pamong praja* harus peka, mau mendengarkan, mengamati

fenomena yang sedang terjadi dan *tanggap ing sasmita* dalam dunia kerjanya.

Hadirin sekalian,

Apabila kita renungkan, pejabat fungsional dapat diibaratkan pasukan elit, layaknya kesatuan elit Bhayangkara di era Majapahit yang digdaya dalam kanuragan, olah pikir dan olah rasa. Seorang prajurit Bhayangkara diibaratkan memiliki kemampuan setara dengan 40 prajurit biasa! Selain wajib punya kemampuan lebih, para Bhayangkara haruslah sangat cerdas. Kecerdasaan diperlukan ketika mereka harus melakukan misi-misi intelijen, seperti menyusup, mengintai, merusak dari dalam dan sebagainya.

Tak beda dengan pejabat fungsional, sebenarnya. Insan yang menyandang jabatan ini haruslah seseorang yang *linuwih*, pakar teknis-spesialis di bidang tertentu. Keberadaan mereka bisa menjadi inisiator, inovator dan motor penggerak roda institusi dalam mencapai garis visi dan misi. Didukung dengan teknologi dan literasi, pejabat fungsional dituntut untuk *weruh sadurunge winarah*, sekali lagi dengan menerapkan kohesi sosial bermodalkan amalan *Sukeng Tyas yen Den Hita*, menggunakan panca indra dan empati untuk mengamati, mendengarkan dan menerima nasihat dari semua pihak.

Hadirin yang Saya Hormati,

Konsep organisasi yang dibangun pemerintah saat ini memiliki kebijakan miskin struktur dan kaya fungsi. Struktur organisasi seramping mungkin, tetapi fungsinya dioptimalkan sehingga diperlukan jabatan-jabatan fungsional mengikuti amanah reformasi birokrasi.

Menghadapi era Revolusi Industri Keempat yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini menjadikan perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks.

Sejumlah permasalahan mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di Indonesia, seperti sistem pengembangan karir dan penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik. Permasalahan-permasalahan klasik ini tentunya harus segera ditangani, senyampang masih ada kesempatan untuk memperbaikinya.

Dari aspek *desain organisasi*, perbaikan dan penguatan dapat dimulai dengan upaya membangun

desain organisasi yang dinamis dan berbasis fungsional. Tujuannya, agar terjalin konektivitas antara karir fungsional dan struktural.

Perbaikan dan penguatan manajerial SDM Jabatan Fungsional harus dilakukan di semua tahapan sejak tahap seleksi. ***Seleksi*** harus fokus pada keahlian yang dibutuhkan oleh suatu jabatan fungsional untuk menjamin orang yang tepat menempati jabatan yang sesuai (*right man on the right place*).

Selain desain organisasi dan seleksi, manajemen SDM Jabatan Fungsional yang baik juga harus memiliki sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir yang terintegrasi dalam sistem pembinaan jabatan fungsional.

Sistem penilaian kinerja harus representatif dengan didasari oleh Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional yang jelas dan terkait langsung dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator agar Jabatan Fungsional dalam bekerja tidak terjebak dalam kinerja individual demi perolehan angka kredit dan tunjangan semata.

Pola pengembangan karir Jabatan Fungsional juga harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pemegang jabatan fungsional untuk melakukan perpindahan/lintas lembaga. Untuk

menunjang hal ini, dibutuhkan pula suatu pengembangan kompetensi yang riil dan mampu menghasilkan pejabat fungsional dengan kemampuan yang aktual dan aplikatif.

Dengan melaksanakan perbaikan dan penguatan ada dua aspek tersebut, diharapkan peran Jabatan Fungsional akan semakin optimal. Kontribusinya pun akan semakin kuat dalam mendorong terwujudnya *world class bureaucracy* di Indonesia.

Besar harapan kita semua agar ASN dapat bekerja dengan prinsip *Temen Temu Tekan*. Kesungguhan dalam bekerja akan melahirkan rasa *Suwung Pamrih Tebih Ajrih*, karena tidak adanya beban apabila seluruh kewajiban telah selesai dilaksanakan.

Tak boleh dilupakan, ASN adalah seorang *pamong praja*—pelayan masyarakat, sekaligus *kawula*. Dalam prosesnya, seorang *kawula* haruslah melakukan lelaku *ngawula*. Ada 4 (empat) syarat yang harus dimiliki dalam upaya *ngawula*, yaitu **kewasisan**, **taberi**, **budi rahayu**, dan **kasarasan**. *Kewasisan*—adalah kepandaian atau kompetensi; *taberi*—rajin dan telaten, *budi rahayu*—perilaku yang baik; dan *kasarasan*—sehat jiwa dan raga....

Demikian sekiranya yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Seminar dan Pengukuhan Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda DIY dapat menjadi ihktiar bersama dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dan menyejahterakan masyarakat melalui layanan publik yang sesuai ekspektasi dalam tataran *Hamemayu Hayuning Bawana*.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SAMBUTAN

**BENCHMARKING KE BEST PRACTICE
JOGJA PLAN, E-POSTI DAN SAHABAT RIMBA**

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

**Yang Kami hormati:
Seluruh Rombongan Pelatihan Kepemimpinan
Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian RI.**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara “**BENCHMARKING KE BEST PRACTICE JOGJA PLAN, E-POSTI DAN SAHABAT RIMBA**”.

Saya mengucapkan “**Sugeng Rawuh, Selamat Datang di Yogyakarta!**” dimana harmoni antara keindahan alam dan keagungan budaya Jawa terjalin dalam semangat ke-Indonesia-an.

Hadirin sekalian,

Inovasi adalah tulang punggung bagi organisasi pembelajar. Era Industri Keempat telah menuntut setiap institusi untuk beradaptasi terhadap ekspektasi masyarakat melalui adopsi dan adaptasi terhadap teknologi informasi. David Lye bahkan menyatakan pentingnya inovasi dan menata ulang layanan pemerintah dengan menyatakan:

“Revolusi Industri Keempat memungkinkan masyarakat menguasai penggunaan teknologi dengan otonomi yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini bisa menjadi penantang

layanan pemerintah dan institusinya melalui cara-cara yang disruptif.

Pelayanan pemerintah akan dibandingkan dengan kemudahan dan kenyamanan penggunaan teknologi secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah di era digital nan disruptif ini? Jawabannya sederhana: Menjaga kohesi sosial!

Saran tersebut disampaikan oleh **David Lye**, konsultan perusahaan General Electric. Ada benarnya apa yang disampaikan oleh Lye. Aparat pemerintah memang harus menguasai teknologi, mengikuti tuntutan dan perubahan jaman, tetapi tetap harus *cancut taliwanda*, turun langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknologi tetaplah teknologi, sebarang benda mati yang kadang memiliki dua sisi—dan dipastikan tidak mempunyai hati nurani. Mau tidak mau, aparat pemerintah sebagai *pamong praja* harus peka, mau mendengarkan, mengamati fenomena yang sedang terjadi dan *tanggap ing sasmita* dalam dunia kerjanya. Sinergitas antara layanan sepenuh hati dengan teknologi harus diwujudkan, jangan sampai inovasi mati karena tidak ada keberlanjutan.

Akhir kata, selamat melaksanakan benchmarking, semoga dapat memberikan manfaat bagi proses pelatihan kepemimpinan yang Anda ikuti. Terima kasih telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi benchmarking, semoga dapat menjadi inspirasi dalam belajar, berkarya dan berinovasi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SAMBUTAN

**ESKPOSE HASIL KAJIAN KEBIJAKAN
PENANGANAN KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DIY**

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Yang Kami hormati:

- Kepala Biro Bina Mental Spiritual;
- Tenaga Ahli dan Narasumber;
- Tamu Undangan dan hadirin sekalian.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara “**Eskpose Hasil Kajian Kebijakan Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY**”.

Hadirin sekalian,

Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan, 3 dari setiap 1.000 orang penduduk DIY mengalami gangguan jiwa berat. Sebuah fakta yang cukup mengejutkan, mengingat penduduk DIY umumnya hidup dalam balutan nilai-nilai budaya Jawa yang kuat dan mengajarkan setiap orang untuk bersikap “nrima ing pandum”, berlapang hati atas segala kesulitan hidup yang dialami.

Bila ditelisik lebih jauh, tingginya prevalensi gangguan jiwa berat di DIY sebetulnya lebih merupakan fenomena kantong-kantong kemiskinan dan bukan potret DIY secara umum.

Selain soal kesehatan jiwa, potret yang disajikan hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa kesehatan jasmani juga menjadi persoalan pelik di DIY. Secara nasional, prevalensi penyakit tidak menular di DIY melebihi rata – rata nasional bahkan

ada beberapa penyakit yang mencapai angka tertinggi nasional.

Khusus gangguan jiwa, DIY menempati posisi teratas, di atas rata-rata nasional sebesar 7%. Dikutip dari tribunnews.com (21 Februari 2018), berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2016, dengan total penduduk DIY sekitar 3,594 juta, terdapat 12.322 di merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Hadirin sekalian,

Kajian Kebijakan Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY ini telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sementara sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan sistem layanan kesehatan jiwa yang komprehensif di semua Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat.
2. Mengembangkan payung hukum yang memberikan arah bagi pembangunan pelayanan kesehatan jiwa di DIY.

Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kajian ini. Kajian ini akan memperkuat perlunya pembuatan

payung hukum dalam pelayanan kesehatan mental di DIY. Patut dipahami, perencanaan kebijakan kesehatan sebaiknya didukung hasil riset atau berbasis bukti, yang dikenal sebagai konsep *Evidence-Based Medicine* (EBM). EBM sendiri merupakan integrasi bukti penelitian, keahlian klinis dan *patients value*. EBM sebagai dasar penyusunan regulasi akan semakin kuat kedudukannya apabila diiringi *values-based practice* dalam layanan kesehatan mental. Dengan adanya *value* dan *bukti* yang kuat, maka regulasi pelayanan kesehatan mental di DIY akan semakin mudah diwujudkan.

Demikian sekiranya yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga “**Eskpose Hasil Kajian Kebijakan Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY**” dapat berjalan dengan lancar dan menjadi awal yang baik dalam mewujudkan layanan kesehatan mental dalam membentuk tatanan masyarakat *Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Karta Raharja*.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sambutan

**KUNJUNGAN LAPANGAN TIM BANK DUNIA
DALAM RANGKA KAJIAN PRAKTIK BAIK
PENURUNAN *STUNTING* DI DIY**

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Saya hormati

- **Tim Bank Dunia;**
- **Seluruh Hadirin dan Tamu Undangan.**

Puji dan syukur marilah Kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, Kita semua dapat hadir pada acara "**Kunjungan Lapangan Tim Bank Dunia Dalam Rangka Kajian Praktik Baik**

Penurunan *Stunting* Di DIY” pada pagi yang cerah ini.

Hadirin Sekalian yang Saya Banggakan,

Mengawali sambutan ini pertama-tama atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kami mengucapkan ***selamat datang*** di Yogyakarta. Sebuah kota yang dikenal dengan Kota Pelajar, Kota Budaya dan Kota Wisata. ***Satu kali tidak akan pernah cukup!*** Itulah yang dirasakan wisatawan ketika mereka mengunjungi Yogyakarta, dan mereka akan mengagendakan mengunjungi Yogyakarta lagi pada saat liburan dan berekreasi.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Bank Dunia karena telah berkenan memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan studi ini. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi Kami dapat berjumpa dan bekerjasama dengan Anda sekalian.

Hadirin Sekalian,

Stunting telah menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi anak *stunting*

dan kekurangan gizi merupakan masalah yang harus diperhatikan secara serius. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) pada tahun 2018, sebanyak 30.8% anak balita di Indonesia mengalami *stunting*. Prevalensi ini termasuk cukup tinggi dan perlu ditangani secara cepat, tepat dan proporsional.

Pemerintah Daerah DIY telah menempuh beberapa upaya dalam pencegahan dan menghambat meluasnya *stunting*. Pemda DIY menyelenggarakan kampanye dan deklarasi pencegahan *stunting* di Gedung Olahraga Amongrogo Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2018 silam. Dalam acara tersebut ditekankan bahwa *stunting* bukan hanya masalah kemampuan mengakses makanan bergizi, layanan kesehatan, sanitasi layak dan air bersih. Namun lebih pada masalah pengetahuan, kesadaran, dan gaya hidup atau perilaku warga.

Hadirin sekalian,

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi *stunting* dengan menjadikan penanganan *stunting* sebagai prioritas nasional. Penanganan akan dilaksanakan dengan berbasis bukti dan sedapat mungkin mengambil dari praktik baik yang telah dilaksanakan di tingkat lokal. Pemerintah tentu tak dapat bergerak sendiri dalam menangani *stunting*. Kedatangan Tim World Bank tentu akan memperkuat

langkah pencegahan dan meminimalisir prevalensi *stunting*. Kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, demi mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang lebih merata dan maksimal. Kami percaya, kolaborasi Pemerintah dan Bank Dunia akan membantu percepatan kesejahteraan masyarakat dalam tataran ***Gemah Ripah Loh Jinawi, Titi Tentrem Karta Raharja***.

Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga kegiatan dan dialog yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diagendakan, dan mudah-mudahan banyak hal yang dapat Kita pelajari bersama dan diambil manfaatnya. Kepada Tim Bank Dunia, semoga budaya, panorama dan keramahan Yogyakarta dapat menjadi inspirasi dan memori indah bagi Anda.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SAMBUTAN

**LAUNCHING DAN SOSIALISASI KAMPUNG
KB PERCONTOHAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA SE-DIY**

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Yang Kami hormati:

- Kepala Perwakilan BKKPN DIY;
- Para Narasumber;
- Tamu Undangan dan hadirin sekalian.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara **“Launching Dan Sosialisasi Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota Se-DIY”**.

Hadirin sekalian,

DIY telah membentuk dan mencanangkan program “Kampung KB” sesuai dengan *Road Map* dan Kebijakan Nasional pada tahun 2016 yang lalu. Merujuk pada statistik *Jumlah Kampung KB Menurut Tahun Pembentukan*, hingga tahun 2018 telah terbentuk 158 Kampung KB di seluuh DIY.

Hasil penelitian Nafisah (2018) dengan judul *Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Yogyakarta* menyatakan bahwa Program Kampung KB dalam membentuk Keluarga Sejahtera, sudah memberikan hasil positif, apabila dilihat dari 4 (empat) program unggulan yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Setiap kampung mempunyai program tambahan, dilihat dari permasalahan yang dihadapi.

Disamping keberhasilan yang dicapai, DIY juga dihadapkan pada suatu tantangan dan permasalahan-permasalahan seperti: tingginya angka urbanisasi, tingginya jumlah penduduk lanjut usia sebesar 13,16 persen (455.040 jiwa) dari jumlah penduduk DIY (3.457.491 jiwa) dan tingginya angka penduduk usia muda sebesar 24,54 persen (848.469 jiwa) (SP 2010) dan lain-lain. Semua itu memerlukan penanganan program melalui sinergitas program lintas sektor, penguatan kerjasama dan kemitraan serta bersifat inklusif.

Hadirin sekalian,

Pengembangan Kampung KB harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Adanya Konsep Pentahelix yang dikembangkan oleh pemerintah bisa diterapkan dalam implementasi Kampung KB, mulai dari proses persiapan sampai dengan evaluasinya. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Pentahelix adalah strategi pembangunan dengan fondasi kerjasama lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah—sebagai pemilik *political power*, akademisi—sebagai pemilik *knowledge power*, dunia usaha—sebagai pemilik *economic power*, masyarakat—sebagai *social control* dan media—sebagai pemilik *information power*.

Demikian sekiranya yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga **“LAUNCHING DAN SOSIALISASI KAMPUNG KB PERCONTOHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-DIY”** dapat berjalan dengan lancar dan mendorong tercapainya masyarakat yang *Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Karta Raharja*.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sambutan

**PENYERAHAN PNS PEMDA DIY SEBAGAI
MAHASISWA SEBAGAI MAHASISWA KEPADA
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Saya hormati

- **Tim Civitas Akademika UPN “Veteran” Yogyakarta;**
- **Penerima Beasiswa dari Pemda DIY;**
- **Seluruh Hadirin dan Tamu Undangan.**

Puji dan syukur marilah Kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, Kita semua dapat hadir pada acara ***“Penyerahan PNS Pemda DIY***

Sebagai Mahasiswa Sebagai Mahasiswa Kepada UPN “VETERAN’ Yogyakarta” pada hari ini.

Hadirin Sekalian yang Saya Banggakan,

Mengawali sambutan ini pertama-tama atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kami mengucapkan *selamat* kepada penerima bantuan biaya pendidikan Program Sarjana tahun 2019. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UPN “Veteran” Yogyakarta karena telah berkenan menjalin kerjasama peningkatan kapasitas SDM Pemda DIY.

Hadirin Sekalian,

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen terpenting dalam implementasi manajerial setiap institusi. *Dave Bookbinder*, seorang analis dan konsultan bisnis menyatakan bahwa “*Karyawan adalah aset yang paling berharga dan menjadi kunci keberhasilan organisasi*”. Kompetensi SDM harus senantiasa dikembangkan, tentu merujuk pada kebutuhan organisasi dan tuntutan zaman. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan pemberian bantuan pendidikan di bidang manajemen dan teknik informatika.

Manajemen adalah bidang ilmu yang selalu dinamis dan berkembang mengikuti perkembangan jaman. Beragam definisi manajemen mulai dari Henry Fayol, George R. Terry sampai dengan yang Elton Mayo memiliki penekanan-penekanan pada bidang-bidang spesifik mulai dari pengelolaan SDM, penggunaan teknologi, pembuatan keputusan dan manajemen operasional.

Demikian pula perkembangan teknologi informatika. Perkembangan yang pesat di dunia TI telah menjadikan TI sebagai tulang punggung operasional suatu institusi. Pendayagunaan TI baik untuk personal maupun yang bersifat organisasional terbukti dapat meningkatkan pengalaman dan kinerja. Revolusi Industri 4.0 menuntut SDM yang memahami dan tangkas dalam menggunakan berbagai sarana TI dalam menunjang kinerjanya. Pengembangan TI bagi Pemda merupakan sesuatu hal yang urgent, karena TI sangat mendukung komponen-komponen pemerintahan, seperti sistem informasi manajemen, sistem akuntansi dan sistem layanan publik. Tak kalah penting adalah aspek keamanan yang harus selalu terjaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepada Penerima Bantuan Biaya Pendidikan,

Jadikan kesempatan kuliah untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Bangun konektifitas diantara Anda, karena mulai saat ini segala sesuatu program dan kegiatan harus didesain kolaboratif dan lintas sektoral. Kelola waktu Anda sebaik-baiknya agar semua pelajaran dapat diserap optimal. Ini adalah “*Kawah Candradimuka*” bagi Anda, para SATRIYA Daerah Istimewa Yogyakarta. Besar harapan Saya, Anda menjadi nahkoda bagi masa depan DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mencapai tingkatan *Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Karta Raharja* seutuhnya.

Kepada UPN “Veteran” Yogyakarta,

Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami terbuka untuk berkomunikasi dan berdiskusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM Pemda DIY. Segala bentuk masukan dan saran akan sangat bermanfaat bagi Kami. Tak lupa, Kami titipkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan. Mohon bimbingan dan arahan bagi penerima bantuan agar dapat mencapai titik optimal dalam setiap proses pembelajaran.

Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga semua proses belajar yang akan ditempuh dapat menempa penerima bantuan pendidikan menjadi figur yang kompeten, kreatif, bertanggung jawab dan *migunani tumraping liyan*. Saya percaya bahwa proses pembelajaran ini akan Anda menjadi lebih kompeten dalam bekerja dan lebih humanis dalam hubungan sosial, selaras dengan falsafah *Sinau Maca Mawi Kaca, Sinau Maos Mawi Raos*. Selamat belajar!

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

IR. GATOT SAPTADI